

ANALISIS KINERJA KEUANGAN BANK MILIK PEMERINTAH INDONESIA

Shelli Elsa Gianni, Saiful, Nila Aprila

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu

Abstract

Central government-owned bank is a bank owned by the government / state in which its activities of collecting funds mainly accept deposits in the form of demand deposits and deposits and in the effort to provide short-term credit and fund collection mainly as savings and then to deposit their funds in valuable paper. Whereas a regional government-owned bank is a bank that collects funds primarily accepting deposits in the form of medium-term and long-term deposits and or paper deposits. The aim of this research is to analyze and find out the differences in financial performance between banks owned by the central government and the banks owned by the regional government using financial ratios. The data used in this study are secondary data obtained from the financial statements of banks owned by the central government and banks owned by local governments. The research sample was chosen based on the purposive sampling method of all listed banking companies on the Indonesia Stock Exchange (IDX) and the Financial Services Authority website. Samples obtained were 28 companies with 112 observations.

The results showed that there were significant differences between the financial performance of central government-owned banks and regional government-owned banks from Loan to Deposit Ratio (CAR), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loans (NPLs), Return On Assets (ROA) and Operational Fees on Operational Revenues (BOPO). Whereas in the ratio of Net Interest Margin (NIM) the financial performance of banks owned by the central government and banks owned by regional governments there was no significant difference.

Keywords: LDR,CAR,NPLROA, NIM dan BOPO

1. Pendahuluan

Bank BUMN (Bank Umum Milik Negara) merupakan bank yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dan pendiriannya di bawah UU tersendiri, contoh: BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN. Bank BUMN adalah bank milik pemerintah Indonesia yang masuk dalam list BEI yang dapat memberikan sumbangan APBN dengan Deviden yang diberikan kepada Negara sebagai pemilik dari bank-bank tersebut (Diffia,2015).

Bank Pembangunan Daerah (BPD),sebagai badan usaha milik daerah (BUMD), merupakan salah satu institusi keuangan (perbankan) milik negara/publik. Sebagai institusi perbankan yang menjalankan fungsi intermediasi keuangan, BPD dituntut setiap saat meningkatkan peran dan kinerjanya dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya pembangunan ekonomi. Tetapi BPD dalam pelaksanaan kegiatan bisnis juga harus tunduk pada prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai institusi keuangan publik,termasuk kinerja keuangannya (Saragih, 2017). Contohnya: Bank Aceh, Bank Sumut, Bank Nagari dll.

Penilaian terhadap kinerja bank ditegaskan dalam Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 menyatakan Bank Indonesia turut serta dalam mengawasi dan mengadakan penelitian terhadap kinerja dengan salah satu caranya menggunakan analisis rasio keuangan RGEC. Peraturan ini sekaligus menggantikan Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2014 sebelumnya menggunakan metode CAMELS.

Kinerja bank menjadi pertimbangan yang sangat penting bagi pihak - pihak yang berkepentingan pada bank. Pihak - pihak yang berkepentingan tersebut antara lain adalah investor, kreditur, pemerintah, karyawan serta masyarakat yang berkepentingan lainnya. Penilaian kinerja dapat diartikan sebagai penilaian prestasi yang dapat dicapai. Kinerja keuangan bank dapat dilihat dari laporan keuangan yang secara teratur di publikasikan. Laporan keuangan bank menunjukkan kondisi keuangan bank secara keseluruhan (Kasmir, 2012:280).

Penilaian terhadap kinerja bank ditegaskan dalam Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 menyatakan Bank Indonesia turut serta dalam mengawasi dan mengadakan penelitian terhadap kinerja dengan salah satu caranya menggunakan analisis rasio keuangan RGEC. Peraturan ini sekaligus menggantikan Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2014 sebelumnya menggunakan metode CAMELS.

Analisis rasio keuangan adalah analisis untuk menilai kinerja bank dan merupakan penyederhanaan hasil rasio keuangan. Salah satu metode yang dapat dilakukan untuk menganalisa laporan keuangan adalah analisis rasio meliputi, rasio likuiditas, rasio rentabilitas dan aspek permodalan. Dalam Penelitian ini kinerja keuangan diproksi dengan rasio keuangan anatar lain rasio likuiditas (LDR), rasio solvabilitas (CAR dan NPL) dan rasio profitabilitas (ROA, BOPO dan NIM). Mutahherah (2016), Soleh dan Fitriano (2016) dan Hendrawan dan Nuzula (2017) melakukan analisis kinerja keuangan pada perbankan umum di Indonesia.

Mewengkang (2013) menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan antara bank pemerintah dan bank swasta nasional yang diproksikan dengan rasio-rasio CAR, RORA, NPM, ROA dan OR. Maharani dan Afandy (2009) juga menunjukan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara bank pemerintah dan bank swasta ditinjau dari rasio keuangan LDR, NPL, ROA, ROE,BOPO dan PDN. Tanggulungan (2008) menemukan bahwa rasio assets (CAD dan BDR) bank pemerintah dan bank swasta berbeda signifikan. Purwoko dan Susanto (2008) menganalisis perbedaan RKM antara bank pemerintah dan bank swasta adalah uji Mann-Whitney dan menemukan tidak ada perbedaan kinerja rasio kecukupan modal antara bank pemerintah dan swasta.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Teori Agensi (Agency Theory)

Agency Theory menjelaskan hubungan antara agen (pihak manajemen suatu perusahaan) dengan principal (pemilik). Principal merupakan pihak yang memberikan amanat kepada agen untuk melakukan suatu jasa atas nama principal, sementara agen adalah pihak yang diberi mandat. Dengan demikian agen bertindak sebagai pihak yang berkewenangan mengambil keputusan, sedangkan principal ialah pihak yang mengevaluasi informasi. Menurut Scott (1997) dalam Arifin (2005), inti dari Agency Theory adalah pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan principal dan agen dalam hal terjadi konflik kepentingan. Dalam penelitian ini, perusahaan bertindak sebagai principal, sementara auditor independen merupakan agen.

2.2. Kinerja Keuangan

Analisis rasio keuangan adalah alat-alat analisis yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan di bidang keuangan. Menurut Alwi (1993) analisis rasio dapat dihitung berdasarkan financial statement yang telah tersedia yang terdiri dari : a) Balance Sheet atau neraca; yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu, b) Income Statement atau rugi laba yang merupakan laporan operasi perusahaan selama periode waktu tertentu. Analisis rasio berguna bagi manajemen untuk merencanakan dan menganalisa kinerja perusahaan. Kreditur memanfaatkan hasil analisis untuk memperkirakan risiko atas pengembalian kredit perusahaan.

Sedangkan investor menggunakan untuk memprediksi keuntungan (return) yang diharapkan atas investasinya. Tujuan analisis rasio adalah membantu manajer untuk memahami kondisi perusahaan berdasarkan informasi finansial yang tersedia yang sifatnya terbatas yang berasal dari financial statement.

Adapun kegunaan dari analisis rasio ini adalah sebagai berikut: 1. Bagi pemegang saham dan calon pemegang saham, analisis rasio memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan berkaitan dengan kondisi yang akan datang dan langsung akan berpengaruh terhadap harga saham. Selain itu, dari informasi ini akan diketahui tingkat likuiditas, aktivitas serta leverage sebagai faktor lain dalam penilaian kelanjutan hidup perusahaan serta proyeksi terhadap distribution income di masa yang akan datang. 2. Bagi kreditur, analisis rasio keuangan memberi informasi mengenai finansial perusahaan terutama terkait dengan kemampuan perusahaan membayar kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. 3. Bagi manajemen perusahaan, analisis rasio keuangan memberi informasi mengenai kondisi finansial perusahaan untuk mengambil kebijakan strategis demi kelangsungan dan kemajuan perusahaan. Pengukuran kinerja merupakan analisis data serta pengendalian bagi perusahaan. Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan di atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Bagi investor informasi mengenai kinerja perusahaan dapat digunakan untuk melihat apakah mereka akan mempertahankan investasi mereka di perusahaan tersebut atau mencari alternatif lain. Selain itu pengukuran juga dilakukan untuk memperlihatkan kepada penanam modal maupun pelanggan atau masyarakat secara umum bahwa perusahaan memiliki kreditibilitas yang baik (Munawir, 2002:85). Kinerja keuangan dapat diukur melalui rasio-rasio kinerja keuangan, seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio rentabilitas. Rasio likuiditas adalah analisis yang dilakukan terhadap kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. Beberapa rasio likuiditas yang sering dipergunakan dalam menilai kinerja keuangan suatu perusahaan antara lain: Cash Ratio (CR), Reserve Requirement (RR), Loan to Deposit Ratio (LDR), dan Loan to Asset Ratio (LAR) (Loen dan Ericson, 2008). Sedangkan untuk perusahaan di Indonesia, rasio likuiditas yang sering digunakan adalah LDR (Loan to Deposit Ratio). Pada penelitian ini, proksi pengukuran kinerja keuangan dilakukan dengan rasio-rasio likuiditas (LDR) rasio solvabilitas (CAR dan NPL) dan rasio profitabilitas (ROA, NIM dan BOPO)

Rasio likuiditas diproksi oleh Loan to Deposit Ratio (LDR). Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah kemampuan bank untuk memenuhi pembayaran kembali deposito pihak ketiga yang telah jatuh tempo dan harus segera dipenuhinya. Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 menjelaskan bahwa batas aman bawah loan to deposit ratio yaitu 78% dan batas aman atas yaitu 92%. Rumus untuk menghitungnya adalah:

$$LDR = \text{Kredit yang diberikan} / \text{dana pihak ketiga}$$

Rasio profitabilitas diproksi dengan CAR dan NPL (Soleh dan Fitriano, 2017). (a). Capital Adequacy Ratio (CAR) syarat ini kembali diubah melalui PBI No. 26 Tahun 2008 menjadi minimal CAR yang dimiliki harus sebesar 8 %. Tak lama berselang, tepatnya jelang akhir tahun, BI di masa kepemimpinan Boediono kembali merevisi persyaratan CAR minimal 8 persen menjadi CAR cukup positif lewat PBI No. 30 Tahun 2008. Menurut Surat Edaran BI Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, Rasio CAR diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$CAR = \text{Modal Bank} / \text{Total ATMR}$$

Besaran standar NPF yang ditetapkan oleh BI adalah 5%. Perhitungan NPF ini adalah sebagai berikut

$$NPL = (\text{Kredit Bermasalah} / \text{Total Kredit}) \times 100 \%$$

Dalam penelitian ini rasio profitabilitas diproksi oleh ROA, NIM dan BOPO. Return On Assets (ROA) Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 standar return on assets adalah 1,25%. Rumus yang digunakan adalah:

$ROA = \text{Earning before Taxes} / \text{Total Assets}$

Net Interest Margin (NIM) Penilaian rasio NIM berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP, NIM dikatakan sehat bila memiliki rasio diatas 2%.

$NIM = \text{Pendapatan Bunga Bersih} / \text{Rata-rata Aktiva Produktif} \times 100\%$

Biaya Opeasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Penilaian rasio BOPO berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP dikatakan sehat jika $\leq 94\%$. Rumus untuk menghitung BOPO:

$BOPO = \text{Biaya Operasional} / \text{Pendapatan Operasioanal} \times 100\%$

2.3. Penelitian Terdahulu

Irawan (2011) melakukan penelitian dengan tujuan untuk analisis kinerja bank-bank pembangunan daerah di indonesia serta variabel-variabel yang mempengaruhinya dengan sampel 10 bank pembangunan daerah. Hasil pengujian menunjukkan bawa variabel DPK dan LDR mempengaruhi kinerja bank BPD di Indonesia sedangkan CAR dan DI tidak mempengaruhi kinerja bank BPD di Indonesia. Marzuki, Pahlevi dan Pono (2012) melakukan penelitian mengenai Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Pemerintah Dan Bank Swasta Nasional dengan sampel sebanyak 38 bank.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika diukur dari rasio-rasio CAR, RORA, NPM, ROA dan OR, ternyata tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan antara bank pemerintah dan bank swasta nasional. Namun jika dilihat dari LDR dan CM Ratio, ternyata terdapat perbedaan kinerja keuangan antara bank pemerintah dan bank swasta nasional. Mawengkang (2013) melakukan penelitian mengenai Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Pemerintah Dan Bank Umum Swasta Nasional Yang Tercatat Di BEI dengan sampel sebanyak 33 bank. Hasil penelitian menunjukan tidak terdapat perbedaan pada QR, ATLR, LDR, DAR, DER, CAR, ROA, ROE dan NPM antara bank pemerintah dan bank umum swasta nasional. Saleh dan Fitriano (2016) melakukan penelitian mengenai Kinerja Keuangan Bank Milik Pemerintah Indonesia (Studi Kasus: BNI, BRI, BTN, Bank Mandiri) dengan sampel sebanyak 4 bank.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa LDR dan NPL berpengaruh signifikan terhadap ROA sedangkan CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Siallagan dan Yuyetta (2016) melakukan penelitian tentang Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sektor Perbankan dengan Metode Camel Di Indonesia (Studi Komparatif: BPD, Bank BUMN, Bank Swasta Nasional, Dan Bank Asing) dengan sampel sebanyak 40 bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank asing memiliki kinerja terbaik dalam hal modal dan kualitas aset, bank milik pemerintah memiliki kinerja terbaik dalam hal pendapatan LDR dan aspek manajemen, dan bank swasta nasional memiliki kinerja terbaik dalam hal likuiditas. Berdasarkan uji Kruskal Wallis dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara kinerja keuangan bank pembangunan daerah, bank yang dimiliki pemerintah, bank swasta nasional dan bank asing dengan CAR, NPL, rasio Pengeluaran terhadap Rasio Pendapatan, ROA, ROE, dan LDR.

Hendrawan dan Nuzula (2017) melakukan penelitian mengenai Analisis Kinerja Keuangan Bank Milik Negara (BumN) Berdasarkan Rasio Keuangan (Studi Pada Bank Milik Negara (BUMN) Yang Terdaftar Di BEI Periode 2008-2016) dengan sampel sebanyak 4 bank. Dari hasil analisis dapat diketahui kinerja keuangan bank milik negara (BUMN) pada rasio rentabilitas kurangnya memaksimalkan aktiva produktif yang dimiliki dan meningkatkan pendapatan atas pengelolaan aktiva produktif, pada rasio likuiditas bank perlu menyeimbangkan kredit yang diberikan kepada nasabah dan permintaan kredit sehingga tidak terjadi kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek, pada aspek permodalan bank perlu meningkatkan kemampuan mencari sumber dana untuk membiayai kegiatan bank dan kelangsungan hidup bank. Penelitian Wulansari, Junaidi dan David (2019) mengenai Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pada Bank BUMN, BUSN, BPD, Dan Bank Asing Di Indonesia Tahun 2012-2018 Dengan Metode RGEC dengan sampel sebanyak 31 bank.

Hasil pengujian menunjukkan, terdapat perbedaan antara Bank Umum Milik Pemerintah (BUMN), Bank Umum Swasta Nasional, Bank Pembangunan Daerah dan Bank Asing. Rasio NPL, LDR, dan CAR diungguli oleh bank asing, rasio GCG, ROA, dan BOPO diungguli oleh bank BUMN. Dan untuk NIM diungguli oleh BPD.

2.4. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan uraian tersebut penulis menduga terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank milik pemerintah pusat dan bank milik pemerintah daerah, sehingga penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

- H1 : Terdapat perbedaan LDR antara bank milik pemerintah pusat dan bank milik pemerintah daerah
- H2 : Terdapat perbedaan CAR antara bank milik pemerintah pusat dan bank milik pemerintah daerah.
- H3 : Terdapat perbedaan NPL antara bank milik pemerintah pusat dan bank milik pemerintah daerah
- H4 : Terdapat perbedaan ROA antara bank milik pemerintah pusat dan bank milik pemerintah daerah
- H5 : Terdapat perbedaan NIM antara bank milik pemerintah pusat dan bank milik pemerintah daerah
- H6 : Terdapat perbedaan BOPO antara bank milik pemerintah pusat dan bank milik pemerintah daerah

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2013) penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan dan Rasio Keuangan 1. LDR 2. CAR 3. NPL 4. ROA 5. NIM 6. BOPO Uji Beda Bank Milik Pemerintah Pusat Bank Milik Pemerintah Daerah (BPD) menjelaskan fenomena tertentu. Pendekatan kuantitatif dilakukan untuk menjelaskan fenomena lapangan dengan perhitungan angka-angka statistik.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia melalui laman www.idx.co.id. dan otoritas jasa keuangan Metode pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu pemilihan sampel yang representatif dan benar-benar mewakili populasinya. Adapun kriteria sampel yang akan digunakan yaitu : (1) Mempublikasikan laporan keuangan lengkap selama tahun 2016-2019 dan dapat diakses (2) Perusahaan sampel tidak mengalami delisting selama periode pengamatan (3) Memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji beda dengan menggunakan Analysis of Variance (ANOVA) yang merupakan metode untuk menguji hubungan antar satu variabel dependen (metrik) dengan satu atau lebih variabel independen (non metrik atau kategorikal). Analysis of Variance digunakan untuk mengetahui pengaruh utama (main effect) dan pengaruh interaksi (interaction effect) dari variabel independen kategorikal variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan pengaruh interaksi adalah pengaruh sesama atau Joint effect dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Kriteria pengujiannya adalah : - Jika nilai $p\text{-value} < \alpha 0,05$; maka terdapat perbedaan kinerja keuangan yang signifikan antara bank konvensional dan bank syariah. - Jika nilai $p\text{-value} > \alpha 0,05$; maka tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan yang signifikan antara bank konvensional dan bank syariah.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Sampel Penelitian

Sampel penelitian berjumlah 28 bank yang listing www.idx.co.id dan www.bi.co.id yang terdiri dari 4 bank merupakan bank milik pemerintah pusat dan 24 bank milik pemerintah daerah.

Table 1. Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah
Bank Milik Pemerintah Pusat	4
Bank Milik Pemerintah Daerah	24
Jumlah Sampel Yang Digunakan	28

4.2. Normalitas Data

Berdasarkan Tabel 2 di atas diketahui bahwa nilai probabilitas (sig.) variabel penelitian lebih kecil dari alpha 0,05; yang menunjukkan bahwa LDR NPL dan BOPO berdistribusi tidak normal. sedangkan CAR, ROA dan NIM terdistribusi normal. Cental Limit Theorems (CLT) secara umum dapat digunakan untuk sampel besar. Dalam hal ini, nilai sudah dikatakan cukup besar. Semakin besar nilai , maka aproksimasi CLT akan semakin akurat atau semakin mendekati distribusi normal (Ghozali, 2013) jika sampel atau pengamatan lebih besar dari 30, maka distribusi dat diasumsikan normal

Table 2. Tests of Normality

	LDR	CAR	NPL	ROA	NIM	BOPO
Kolmogorov-Smirnov Z	1,387	1,179	1,407	1,220	0,928	1,549
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,043	0,124	0,038	0,102	0,355	0,017

4.3. Deskriptif Statistik

Nilai LDR menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada pihak ketiga. Semakin kecil rasio LDR, maka semakin tinggi kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya (likuid), sebaliknya, semakin besar rasio LDR maka semakin tidak likuid suatu. bank. Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 menjelaskan bahwa batas aman bawah loan to deposit ratio yaitu 78% dan batas aman atas yaitu 92%. Berdasarkan hasil penelitian (tabel 3) diketahui bahwa nilai LDR bank milik pemerintah pusat sebesar 90,54 % dan bank milik pemerintah daerah sebesar 92,32 %. Hasil ini menunjukkan bahwa kedua kelompok bank memiliki kemampuan memenuhi jangka pendek yang berada pada batas Namun secara kuantitatif (angka), bank milik pemerintah daerah masih memiliki nilai LDR lebih baik jika dibandingkan dengan bank bank milik pemerintah pusat.

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan suatu bank dalam mengantisipasi kebutuhan akan tersedianya dana sendiri guna pertumbuhan usaha serta memikul risiko kerugian yang timbul dalam menjalankan usahanya. Semakin tinggi rasio CAR menunjukkan kondisi yang lebih baik, karena bank akan dapat memikul risiko dari modalnya sendiri dalam menjalankan usahanya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 menyebutkan bahwa bank yang memiliki rasio CAR sebesar kurang dari 8% berada dalam pengawasan khusus. Nilai minimum rasio CAR pada bank milik pemerintah pusat sebesar 17,89 % dan nilai maksimum sebesar 22,96% serta rata-rata nilai CAR pada bank milik pemerintah pusat sebesar 20,40%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa bank milik pemerintah pusat memiliki kemampuan permodalan yang berbeda-beda, sehingga terjadi perbedaan yang mencolok di antara sesama bank milik pemerintah pusat . Artinya, bank milik pemerintah pusat memiliki rasio

permodalan yang lebih besar dan telah memenuhi kriteria Bank Indonesia. Selanjutnya, nilai CAR minimum bank milik pemerintah daerah adalah sebesar 14,32 % dan nilai maksimum sebesar 35,47 % serta nilai rata-rata CAR sebesar 22,54 %. Nilai tersebut menunjukkan bahwa rasio kecukupan modal yang dimiliki oleh bank milik pemerintah daerah berada di atas standar Bank Indonesia. Hasil tersebut menunjukkan bahwa bank milik pemerintah daerah memiliki kecukupan modal yang lebih baik dibandingkan dengan bank milik pemerintah pusat.

Table 3. Nilai Rata-rata Data Penelitian

BANK	LDR	CAR	NPL	ROA	NIM	BOPO
Bank milik Pemerintah Pusat						
Mean	90,54	20,40	3,27	2,63	5,85	74,31
Std. Deviation	5,001068	1,713396	2,46847	0,85739	1,198361	6,95735579
Minimum	85,41	17,89	1,90	1,13	4,23	66,48
Maximum	103,45	22,96	12,30	3,86	8,00	87,56
Bank milik Pemerintah Daerah						
Mean	92,32	22,54	1,98	2,78	6,60	76,61
Std. Deviation	16,46975	4,251763	1,512847	1,013082	1,737827	10,85849
Minimum	-8,35	14,32	0,05	-0,23	0,38	60,13
Maximum	125,19	35,47	7,96	7,96	9,73	115,28
Total						
Mean	92,1056	22,2301	2,1619	2,7576	6,4933	76,2755
Std. Deviation	15,5472	4,0536	1,7285	0,9901	1,6876	7,6233
Minimum	-8,35	14,32	0,05	-0,23	0,38	60,13
Maximum	125,19	35,47	12,30	7,96	9,73	115,28

Non Performing Loan (NPL) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menangani risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. Menurut SE BI No. 3/30 DPNP tanggal 14 Desember 2001 Lampiran 14, NPL diukur dengan rasio perbandingan antara kredit yang bermasalah dengan total kredit yang disalurkan. Jika NPL melampaui batas yang ditetapkan regulasi sebesar $> 5\%$, maka ini berarti tingkat risiko kredit meningkat. Dengan demikian, risiko kredit perlu dikelola dengan baik, karena apabila tidak dikelola dengan baik, maka akan mengakibatkan proporsi kredit yang bermasalah semakin besar, sehingga akan berdampak negatif pada kinerja perbankan. Nilai rata-rata NPL untuk bank milik pemerintah pusat adalah 3,27%, sedangkan nilai rata-rata NPL untuk bank pemerintah daerah 1,98%. Nilai NPL dari kedua jenis bank berada dibawah 5% sebagaimana batas yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa resiko kredit yang dihadapi bank (bank milik pemerintah pusat dan bank milik pemerintah daerah) sudah bisa dikelola dengan baik.

Return On Assets (ROA) adalah kemampuan bank menghasilkan keuntungan secara relatif dibandingkan dengan nilai total asetnya. Semakin besar rasio ROA berarti bank memiliki kemampuan yang relatif lebih baik dalam memperoleh laba dari total asetnya. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 6/23/DPNP/2004, nilai ROA yang dipersyaratkan adalah 1,25%. Berdasarkan data penelitian, diketahui bahwa nilai rata-rata rasio ROA bank milik pemerintah pusat selama kurun waktu Tahun 2016-2019 sebesar 2,63%, sedangkan nilai rata-rata ROA bank milik pemerintah daerah adalah sebesar -0,23%. Kondisi ini berarti bahwa bank milik pemerintah pusat memiliki nilai ROA yang lebih baik dibandingkan dengan bank milik pemerintah daerah.

Selanjutnya Net Interest Margin (NIM) merupakan merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan net interest income atas pengelolaan besar aktiva produktif. Rasio NIM juga digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan pendapatan dari bunga dengan melihat kinerja bank dalam menyalurkan kredit, mengingat pendapatan operasional bank sangat tergantung dari selisih bunga dari kredit yang disalurkan (Mahardian, 2008). Semakin besar pendapatan bunga yang dikelola bank, maka kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil (Purwoko dan Sudyatno, 2013). NIM dikatakan sehat bila memiliki rasio diatas 2%. Untuk dapat meningkatkan perolehan NIM maka perlu menekan biaya dana, biaya dana adalah bunga

yang dibayarkan oleh bank kepada masing-masing sumber dana yang bersangkutan. Berdasarkan data penelitian, diketahui bahwa nilai rata-rata rasio NIM untuk bank milik pemerintah daerah adalah 5,85% sedangkan nilai rata-rata NIM untuk bank milik pemerintah daerah adalah 6,60%. Nilai NIM kedua bank (bank milik pemerintah pusat dan bank milik pemerintah daerah) menunjukkan nilai rasio diatas 2%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan bank dalam menghasilkan net interest income atas pengelolaan besar aktiva produktif sudah melebihi batas standar yang ditetapkan Bank Indonesia.

Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan perbandingan antara beban operasional dengan pendapatan operasional. Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 standar biaya operasional terhadap pendapatan operasional yaitu dibawah 94%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata BOPO untuk bank milik pemerintah pusat adalah 74,31%, sedangkan untuk bank milik pemerintah daerah sebesar 76,61%. Nilai BOPO kedua bank (bank milik pemerintah pusat dan bank milik pemerintah daerah) menunjukkan nilai dibawah 94%. Hal ini mengindikasikan bahwa bank tersebut (bank milik pemerintah pusat dan bank milik pemerintah daerah) dalam keadaan sehat.

4.4. Hasil Uji Hipotesis

Penelitian ini bertujuan mengetahui perbedaan kinerja keuangan yang diproksi dengan rasio keuangan antara bank milik pemerintah pusat dan bank milik pemerintah dareah. Untuk keperluan ini digunakan alat analisis One Way Anova (F-test). Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut :

- Jika probabilitas (sig.) <alpha 0,05; maka terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank konvensional dengan bank syariah.
- Jika probabilitas (sig.) >alpha 0,05; maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank konvensional dengan bank syariah.

Hasil dari pengolahan data tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.

Table 4.4. Hasil Perhitungan ANOVA

	Mean	F	Sig.
LDR			
Bank Milik Pemerintah Pusat	90.54	2.64092	0.02271
Bank Milik Pemerintah Daerah	92.32		
CAR			
Bank Milik Pemerintah Pusat	20.40	2.821673	0.0159
Bank Milik Pemerintah Daerah	22.54		
NPL			
Bank Milik Pemerintah Pusat	3.27	3.705674	0.0026
Bank Milik Pemerintah Daerah	1.98		
ROA			
Bank Milik Pemerintah Pusat	2,63	2.586365	0.0124
Bank Milik Pemerintah Daerah	2.78		
NIM			
Bank Milik Pemerintah Pusat	5.85	0.768927	0.5725
Bank Milik Pemerintah Daerah	6.60		
BOPO			
Bank Milik Pemerintah Pusat	74,31	2.429154	0.0343
Bank Milik Pemerintah Daerah	76.61		

Berdasarkan Tabel 4 di atas diketahui bahwa:

- Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank milik pemerintah pusat dengan kinerja keuangan bank milik pemerintah daerah dilihat dari rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) . Hal ini dibuktikan dengan nilai p-value sebesar 0,0227 < alpha 0,05.

- Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank milik pemerintah pusat dengan kinerja keuangan bank milik pemerintah daerah dilihat dari rasio Capital Adequency Ratio (CAR). Hal ini dibuktikan dengan nilai p-value sebesar $0,0159 < \alpha 0,05$.
- Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank milik pemerintah pusat dengan kinerja keuangan bank milik pemerintah daerah dilihat dari rasio Non Performing Loan (NPL). Hal ini dibuktikan dengan nilai p-value sebesar $0,0026 < \alpha 0,05$.
- Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank milik pemerintah pusat dengan kinerja keuangan bank milik pemerintah daerah dilihat dari rasio Return on Aset (ROA). Hal ini dibuktikan dengan nilai p-value sebesar $0,0124 < \alpha 0,05$.
- Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank milik pemerintah pusat dengan kinerja keuangan bank milik pemerintah daerah dilihat dari rasio Net Interest Margin (NIM). Hal ini dibuktikan dengan nilai p-value sebesar $0,5724 > \alpha 0,05$.
- Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank milik pemerintah pusat dengan kinerja keuangan bank milik pemerintah daerah dilihat dari rasio Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Hal ini dibuktikan dengan nilai p-value sebesar $0,0343 < \alpha 0,05$.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis maka dapat dirangkum hasil pengujian sebagai berikut:

Table 5. Rangkuman Hasil Pengujian Hipotesis

No	Hipotesis	Keterangan
1	Terdapat perbedaan nilai LDR antara bank milik pemerintah pusat dan bank milik pemerintah daerah	Diterima
2	Terdapat perbedaan nilai CAR antara bank milik pemerintah pusat dan bank milik pemerintah daerah	Diterima
3	Terdapat perbedaan nilai NPL antara bank milik pemerintah pusat dan bank milik pemerintah daerah	Diterima
4	Terdapat perbedaan nilai ROA antara bank milik pemerintah pusat dan bank milik pemerintah daerah	Diterima
5	Tidak terdapat perbedaan nilai NIM antara bank milik pemerintah pusat dan bank milik pemerintah daerah	Ditolak
6	Terdapat perbedaan nilai BOPO antara bank milik pemerintah pusat dan bank milik pemerintah daerah	Diterima

4.5. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio LDR bank kedua jenis bank dalam penelitian menunjukkan terdapat perbedaan antara bank milik pemerintah pusat dan daerah . Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata LDR kedua jenis bank menunjukkan perbedaan. Rata-rata nilai LDR bank milik pemerintah pusat sebesar 90,54% lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata nilai LDR milik pemerintah daerah sebesar 92,32% dan nilai signifikansi sebesar 0,0227. Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 menjelaskan bahwa batas aman bawah loan to deposit ratio yaitu 78% dan batas aman atas yaitu 92%, maka nilai yang diperoleh oleh kedua jenis bank berada diatas batas aman bawah dan batas aman atas yang dipersyaratkan.

Namun, dari hasil penelitian diketahui bahwa perbedaan kinerja pada rasio LDR terjadi karena bank milik pemerintah pusat maupun bank bank milik pemerintah daerah memiliki jumlah yang berbeda dalam menggunakan dana pihak ketiga berupa pinjaman jangka pendek (dari tabungan dan deposito), sehingga aktiva kedua jenis bank tersebut memiliki kemampuan yang tidak sama dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya jika sewaktu-waktu pihak ketiga (penabung) menarik dananya secara besar-besaran.

Hasil penelitian ini terkonfirmasi dengan penelitian yang dilakukan oleh Siallagan dan Yuyetta (2016) yang melakukan penelitian tentang Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sektor Perbankan dengan Metode Camel Di Indonesia (Studi Komparatif: BPD, Bank BUMN, Bank Swasta Nasional, Dan Bank Asing). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, bank milik pemerintah memiliki kinerja terbaik dalam hal pendapatan LDR

Jadi, berdasarkan hasil penelitian dapat dibuktikan bahwa kinerja bank milik pemerintah pusat lebih baik daripada bank milik pemerintah daerah dari rasio

LDR memiliki perbedaan yang signifikan. Jika dilihat dari rasio LDR yang diperoleh, diketahui bahwa kinerja bank milik pemerintah pusat lebih baik jika dibandingkan dengan kinerja bank milik pemerintah daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio CAR bank milik pemerintah pusat dan bank milik pemerintah daerah memiliki perbedaan. Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata CAR kedua jenis bank menunjukkan perbedaan. Rata-rata nilai CAR bank milik pemerintah pusat sebesar 20,40% lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata nilai CAR milik pemerintah daerah sebesar 22,54% dan nilai signifikansi sebesar 0,0159. Rasio kecukupan modal (CAR) untuk Bank milik pemerintah daerah lebih baik dibandingkan dengan Bank milik pemerintah pusat selama tahun 2016-2019, di mana rasio CAR bank milik pemerintah daerah lebih tinggi dibandingkan dengan bank milik pemerintah pusat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 menyebutkan bahwa bank yang memiliki rasio CAR sebesar kurang dari 8% berada dalam pengawasan khusus.

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung unsur risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) yang ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank. Semakin tinggi rasio CAR menunjukkan kondisi yang lebih baik, karena bank akan dapat memikul risiko dari modalnya sendiri dalam menjalankan usahanya.

Hasil penelitian terkonfirmasi dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulansari, Junaedi dan David (2019) yang menemukan bahwa kinerja keuangan bank milik pemerintah pusat lebih baik di bandingkan dengan bank milik pemerintah daerah dilihat dari rasio CAR. Nilai CAR bank milik pemerintah daerah berada di bawah bank milik pemerintah pusat. Hal ini mengindikasikan bahwa Maka semakin tinggi tingkat CAR maka semakin besar pula sumber finansial untuk pengembangan usaha

Jadi, berdasarkan hasil penelitian dapat dibuktikan bahwa kinerja bank milik pemerintah daerah lebih baik daripada bank milik pemerintah pusat dari rasio CAR memiliki perbedaan yang signifikan. Jika dilihat dari rasio CAR yang diperoleh, diketahui bahwa kinerja bank milik pemerintah daerah lebih baik jika dibandingkan dengan kinerja bank milik pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa rasio NPL antara bank milik pemerintah pusat dan bank milik pemerintah daerah memiliki perbedaan yang signifikan. Hal ini dilihat dari nilai rata-rata kedua jenis bank, di mana nilai NPL bank milik pemerintah pusat memiliki rata-rata lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai rata-rata bank milik pemerintah daerah. Nilai rata-rata NPL bank pemerintah pusat sebesar 3,27% dan rata-rata NPL bank pemerintah daerah sebesar sebesar 1,98% dan nilai signifikansi sebesar 0,0026. Menurut SE BI No. 3/30 DPNP tanggal 14 Desember 2001 Lampiran 14, NPL diukur dengan rasio perbandingan antara kredit yang bermasalah dengan total kredit yang disalurkan. Jika NPL melampaui batas yang ditetapkan regulasi sebesar $> 5\%$, maka ini berarti tingkat risiko kredit meningkat.

Menurut Prasetyo (2008) kualitas aktiva produktif merupakan kualitas aset sehubungan dengan risiko kredit yang dihadapi bank akibat pemberian kredit dan investasi dana bank pada portofolio yang berbeda. Tingkat kelangsungan usaha bank berkaitan erat dengan aktiva produktif yang dimilikinya, oleh karena itu manajemen bank dituntut untuk senantiasa dapat memantau dan menganalisis kualitas aktiva yang dimiliki kualitas aktiva produktif menunjukkan kualitas aset sehubungan dengan risiko pembiayaan yang dihadapi bank akibat pemberian pembiayaan dan investasi dana. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Penelitian yang dilakukan Siallagan dan Yuyetta (2016) menemukan bahwa kinerja bank milik pemerintah pusat lebih baik dari bank milik pemerintah daerah jika dilihat dari rasio NPL. Peneliti Wulansari, Junaedi dan David (2019) dengan sampel penelitian bank milik pemerintah pusat dan bank milik pemerintah daerah menunjukkan NPL terdapat perbedaan yang signifikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi NPL berarti semakin tinggi juga

tunggakan kredit, hal ini berpotensi menurunkan pendapatan bunga dan menurunkan tingkat laba. Pemberian kredit kepada masyarakat selalu akan menimbulkan risiko-risiko yang menyebabkan kerugian bank, terutama untuk kredit bermasalah.

Jadi, berdasarkan hasil penelitian dapat dibuktikan bahwa kinerja bank milik pemerintah daerah lebih baik daripada bank milik pemerintah pusat dari rasio NPL memiliki perbedaan yang signifikan. Jika dilihat dari rasio NPL yang diperoleh, diketahui bahwa kinerja bank milik pemerintah daerah lebih baik jika dibandingkan dengan kinerja bank milik pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perbandingan rasio ROA pada bank milik pemerintah pusat dan bank bank milik pemerintah daerah menunjukkan perbedaan. Hasil ini dibuktikan dengan rata-rata nilai ROA bank milik pemerintah pusat sebesar 2,63% dan rata-rata nilai ROA bank milik pemerintah daerah sebesar 2,78% dan nilai signifikansi sebesar 0,0124. Kondisi ini menunjukkan bahwa bank milik pemerintah pusat dan bank bank milik pemerintah daerah memiliki perbedaan kinerja secara signifikan. Jika dikonfirmasi dengan ketentuan Bank Indonesia, nilai ROA yang dipersyaratkan adalah sebesar 1,25% (Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP/2004), maka nilai ROA bank milik pemerintah pusat dan bank milik pemerintah daerah berada diatas ketentuan yang telah ditetapkan oleh BI.

Analisis rasio rentabilitas bank adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Rasio rentabilitas yang digunakan adalah Return On Asset (ROA). Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulasari, Junaedi, dan David (2019) serta Siallagan dan Yuyetta (2016) yang menemukan bahwa kinerja keuangan bank milik pemerintah pusat lebih baik di bandingkan dengan bank milik pemerintah daerah dilihat dari rasio ROA. Nilai ROA bank milik pemerintah daerah berada di atas bank milik pemerintah pusat.

Jadi, berdasarkan hasil penelitian dapat dibuktikan bahwa kinerja bank milik pemerintah daerah lebih baik daripada bank milik pemerintah pusat dari rasio ROA yang memiliki perbedaan yang signifikan. Jika dilihat dari rasio ROA yang diperoleh, diketahui bahwa kinerja bank milik pemerintah daerah lebih baik jika dibandingkan dengan kinerja bank milik pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perbandingan rasio NIM pada bank milik pemerintah pusat dan bank bank milik pemerintah daerah menunjukkan tidak ada perbedaan. Hasil ini dibuktikan dengan rata-rata nilai NIM bank milik pemerintah pusat sebesar 5.85% dan rata-rata nilai NIM bank milik pemerintah daerah sebesar 6.60% dan nilai signifikan sebesar 0,5725. Kondisi menunjukkan bahwa bank milik pemerintah pusat dan bank bank milik pemerintah daerah memiliki perbedaan kinerja secara signifikan. Jika dikonfirmasi dengan ketentuan Bank Indonesia, nilai NIM yang dipersyaratkan adalah sebesar 6% (Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017).

Net Interest Margin (NIM). merupakan rasio untuk menganalisis pendapatan bunga setelah dikurangi beban pokok. Rasio NIM mencerminkan risiko pasar yang timbul akibat berubahnya kondisi pasar, di mana hal tersebut dapat merugikan bank (Hasibuan, 2007). Rasio NIM juga digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan pendapatan dari bunga dengan melihat kinerja bank dalam menyalurkan kredit, mengingat pendapatan operasional bank sangat tergantung dari selisih bunga dari kredit yang disalurkan (Mahardian, 2008). Semakin tinggi NIM sebuah bank, maka artinya bank tersebut semakin bagus. NIM yang besar menandakan perusahaan mampu menghasilkan pendapatan bunga yang semakin besar dari aktiva produktifnya. Sehingga juga dapat menumbuhkan nilai profitabilitas sebuah perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulasari, Junaedi, dan David (2019) yang menemukan bahwa kinerja keuangan bank milik pemerintah daerah lebih baik di

bandingkan dengan bank milik pemerintah pusat dilihat dari rasio NIM. Nilai NIM bank milik pemerintah daerah berada di atas bank milik pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa rasio BOPO antara bank milik pemerintah pusat dan bank milik pemerintah daerah memiliki perbedaan yang signifikan. Hal ini dilihat dari nilai rata-rata kedua jenis bank, di mana nilai BOPO bank milik pemerintah pusat memiliki rata-rata lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai rata-rata bank milik pemerintah daerah. Nilai rata-rata BOPO bank pemerintah pusat sebesar 74.31% dan rata-rata NPL bank

pemerintah daerah sebesar 76.61% dan nilai signifikansi sebesar 0,0343. Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 standar biaya operasional terhadap pendapatan operasional yaitu dibawah 94%. Bila ditinjau dari angkanya secara keseluruhan bank yang diteliti dikategorikan sehat hanya terdapat sebagian kecil bank yang belum efisiensi nilai BOPO oleh karena itu dibutuhkan pengendalian biaya operasional oleh manajemen agar dapat memperoleh pendapatan yang maksimal sehingga juga meningkatkan kinerja bank dalam memperoleh laba. Penelitian ini terkonfirmasi dengan Penelitian Wulansari, Junaedi dan David (2016) menunjukkan bahwa kinerja keuangan bank milik pemerintah pusat lebih baik di bandingkan dengan bank milik pemerintah daerah dilihat dari rasio BOPO. Nilai BOPO bank milik pemerintah pusat lebih kecil dari pada bank milik pemerinth daerah. Hal ini mengindikasi bahwa Semakin kecil nilai BOPO maka dapat dikatakan semakin efisien bank dalam menjalankan operasionalnya.

Jadi, berdasarkan hasil penelitian dapat dibuktikan bahwa kinerja bank milik pemerintah pusat lebih baik daripada bank milik pemerintah daerah dari rasio BOPO yang memiliki perbedaan yang signifikan. Jika dilihat dari rasio BOPO yang diperoleh, diketahui bahwa kinerja bank milik pemerintah pusat lebih baik jika dibandingkan dengan kinerja bank milik pemerintah daerah.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan, di antaranya adalah:

- Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Bank milik pemerintah pusat dengan kinerja keuangan Bank miik pemerintah daerah dilihat dari rasio Loan to Deposit Ratio (LDR). Hal ini menunjukkan bahwa bank milik pemerintah pusat dan bank milik pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan yang berbeda dalam mengembalikan dana pihak ketiha. Jika bank memiliki nilai LDR yang semakin tinggi, maka kinerja bank semakin tinggi atau semakin baik.
- Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Bank milik pemerintah pusat dengan kinerja keuangan Bank miik pemerintah daerah dilihat dari rasio Capital Adequacy Ratio (CAR). Hasil ini menunjukkan bahwa jika bank memiliki nilai CAR yang semakin tinggi, maka kinerja bank semakin tinggi atau semakin baik.
- Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Bank milik pemerintah pusat dengan kinerja keuangan Bank milik pemerintah daerah dilihat dari rasio Non Perfoming Loan (NPL). Hasil ini menunjukkan bahwa kedua manajemen bank memiliki kemampuan dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan bank.
- Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Bank milik pemerintah pusat dengan kinerja keuangan Bank milik pemerintah daerah dilihat dari rasio Return On Asset (ROA). Hasil ini menunjukkan bank memiliki kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan .
- Tidak Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Bank milik pemerintah pusat dengan kinerja keuangan Bank milik pemerintah daerah dilihat dari rasio Net Interest Margin (NIM). Namun, dari hasil pengukuran kinerja ini menunjukkan bahwa kedua jenis bank memiliki kemampuan yang rendah dalam pengelolaan aktiva produktif.

- Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Bank milik pemerintah pusat dengan kinerja keuangan Bank milik pemerintah daerah dilihat dari Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Hasil pengukuran menunjukkan bahwa kedua manajemen bank memiliki kemampuan dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional.

References

- Alwi. (1993). Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: Liberty
- Arifin. (2005). Pidato Pengukuhan Guru Besar UNDIP. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Diffia, H. A., & Santoso, A. L. (2015). Analisis Kinerja Keuangan Bank BUMN Periode 2012-2014. *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 5; 1-11.
- Ghozali, Imam. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, BP UNDIP, Semarang.
- Hasibuan, H. Malayu S.P. (2007). Dasar-dasar Perbankan. Jakarta: Bumi Aksara
- Hendrawan, Reza dan Nila Firdausi Nuzula. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Bank Milik Negara (Bumh) Berdasarkan Rasio Keuangan (Studi Pada Bank Milik Negara (BUMN) Yang Terdaftar Di BEI Periode 2008-2016). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 53; 132-141.
- Irawan, Bambang. (2011). Analisis Kinerja Bnak-Bank Pembangunan Daerah di Indonesia serta Variabel-Variabel yang mempengaruhinya. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 11 (1); 143-163.
- Kasmir. (2012). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Loen, Boy & Sonny Ericson. (2007). Manajemen Aktiva Pasiva Bank Non Devisa. Jakarta : PT. Grasindo
- Maharani, Vivi Putri dan Chairil Afandy. (2009). Analisis Perbandingan KinerjaKeuangan Bank Pemerintah Dan Bank Swasta Di Bursa Efek Indonesia(BEI) Periode 2008–2012. *Management Insight*, 9: 16-29.
- Mahardian, Pandu. (2008). Analisis Pengaruh Rasio CAR,BOPO, NPL, NIM dan LDR terhadap kinerja keuangan perbankan. Tesis Progam magister manajemen Universitas Diponegoro. Semarang.
- Marzuki, M., Cepi Pahlevi & Maat Pono. (2012). Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Pemerintah Dan Bank Swasta Nasional. *Jurnal Analisis*, 1; 66 – 72 .
- Mawengkang, Ypes Regina. (2013). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Pemerintah Dan Bank Umum Swasta Nasional Yang Tercatat Di BEI. *Jurnal EMBA*, 1344-354
- Munawir, S. (2002). Analisis Laporan Keuangan, Edisi Keempat. Yogyakarta: Liberty.
- Mutahherah, Suhufam. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Milik Negara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015. Skripsi tidak dipublikasikan. Surabaya. Program Studi Akuntansi STIE Perbanas.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 Perubahan atas PBI No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia Nomor : 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Prasetyo, Adi. (2008). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah BMT Kaffah Yogyakarta. Skripsi FE STAIN. Surakarta
- Purwoko, D., & Sudiyatno., B. (2013). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Bank. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, 6; 25 – 39.
- Saleh, Ahmad dan Yun Fitriano. (2016). Kinerja Keuangan Bank Milik Pemerintah Indonesia (Studi Kasus:Bni, Bri, Btn, Bank Mandiri). *Ekombis Review*, 23-35.
- Santoso, Singgih. (2002). Pengolahan Data dengan Program SPSS. Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia
- Saragih, Juli Panglima. (2017). Laporan Kinerja Keuangan Bank Pembangunan Daerah Dalam Konteks Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Publik. *Jurnal BPPK*, 10; 59-70.
- Siallagan, Pangihutan & Etna Nur Afri Yuyetta. (2016). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sektor Perbankandengan Metode Camel Di Indonesia(Studi Komparatif: Bpd, Bank Bumh, Bank Swasta Nasional,Dan Bank Asing). *Journal Of Accounting*, 5 (4);1-15.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta
- Surat Edaran Bank Indonesia No.3/30/DPNP tentang Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan BulananBank Umum serta Laporan tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia

- Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tentang standar biaya operasional terhadap pendapatan operasional
- Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Surat Edaran (SE) BI No.15/11/DPNP tentang prinsip kehati-hatian dalam penyertaan modal.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang standar return on assets
- Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 792 Tahun 1990 tentang Perbankan. Jakarta.
- Tanggulungan, Gusti. (2008). Komparasi Kinerja Bank Pemerintah dan Bank Swasta. *Jurnal Ekonomi*, 17 (8) ;1-12.
- Wulansari, Vivi., Achmad Taviv Junaedi dan David. (2019). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pada Bank Bumn, Busn, Bpd, Dan Bank Asing Di Indonesia Tahun 2012-2018 Dengan Metode Rgec. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 7 (3);352-363.